

Manajemen Keuangan Di Madrasah Aliyah Swasta Pesantren Ar- Raudlatul Hasanah Medan

Aulya Fahma^{1*}, Arida Salsabillah², dan Muhammad Rizky³

^{1 2 3}Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Ar- Raudlatul Hasanah Medan

E-mail: aulyafahma@stitt-rh.ac.id, Salsabilaarida16@gmail.com, mrizkiraudhah@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana manajemen keuangan di Madrasah Aliyah Swasta Pesantren Ar- Raudlatul Hasanah Medan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Adapun hasil penelitian ini yaitu, kegiatan perencanaan anggaran (*Budgetting*) di Pesantren Ar-Raudlatul Hasanah tingkat Aliyah berpacu pada anggaran pesantren, namun untuk metode para staff Aliyah menggunakan sistem input data di aplikasi sesuai dengan standart yang ada di KEMENAG seperti standart sarana dan prasarana dan lain-lain. Adapun Pelaksanaan keuangan Pesantren Ar-Raudlatul Hasanah tingkat Aliyah pada dana BOS, maka yang melibatkan tim inti madrasah. Adapun tim inti madrasah tersebut ialah kepala madrasah, bendahara dan juga kepala tata usaha Aliyah. Sedangkan evaluasi keuangan di tingkat Aliyah adalah dalam pelaksanaan sistemnya. Karena tidak hanya bagian Aliyah saja yang berkecimpung didalamnya melainkan banyak melibatkan seksi-seksi lainnya.

Kata kunci: *Budgetting, Accounting, Auditing*

PENDAHULUAN

Pesantren merupakan yayasan pendidikan Islam yang paling mapan di Indonesia, dimana organisasi ini masih sangat menjaga kualitas adat dan sosial negara Sekolah Pengalaman Hidup Islami juga merupakan salah satu lembaga publik di bidang pendidikan yang berperan penting dalam menciptakan usia yang berkualitas. Dalam (UU) Nomor 20 Tahun 2003 tanggal 8 Juli 2003 tentang Sistem Pendidikan Umum (SISDIKNAS), sekolah Islam yang tinggal di dalam sebagai lembaga pendidikan yang ketat diberi kewenangan untuk menyelenggarakan pendidikan formal atau nonformal seperti sekolah atau madrasah. Pesantren merupakan lembaga pendidikan yang memiliki ciri khas tersendiri yang tidak dimiliki lembaga pendidikan yang lain, yaitu sub kultural dan budaya (Fitri R *et al*, 2023).

Kemajuan suatu perusahaan tidak sepenuhnya ditentukan oleh sifat SDM-nya. SDM tidak ditentukan oleh sifat sekolah, karakter dan kemampuan. Ketiga unsur tersebut dapat dibingkai melalui interaksi instruktif. Tujuan pendidikan negeri adalah untuk membingkai generasi muda yang berakhlak, berilmu dan berkemampuan (UU No. 20 Tahun 2003). Mengingat pentingnya tugas pendidikan, pihaknya menghimbau sekolah untuk terus mengupayakan sifat pengajaran bagi siswa. (Chairunnisa, 2016).

Manajemen keuangan di sebuah madrasah adalah hal yang sangat penting dalam hubungannya dengan seluruh kegiatan madrasah. Kepala madrasah sebagai *Leader* harus memiliki kecakapan tentang manajemen keuangan. Karena untuk menjalankan semua kegiatan di madrasah tidak terlepas dari dana. Tentu semua dana yang ada di dalam sebuah madrasah harus dikelola dengan baik (Adillah, 2016).

Manajemen keuangan madrasah merupakan seni mengelola pendanaan baik uang masuk dan uang keluar dan semua kegiatan keuangan dilembaga madrasah agar keuangan tepat sasaran dan tepat guna. Kepala sekolah sebagai penyelenggara rencana belanja sekolah harus memahami administrasi keuangan sekolah, khususnya dalam mengawasi dan menggunakan seluruh kebutuhan sekolah (Myende *et al.*, 2018). Pengelolaan keuangan sekolah sangat penting dibandingkan dengan pelaksanaan kegiatan sekolah (Said, 2019). Seorang kepala sekolah sangat mengutamakan informasi mengenai administrasi, khususnya administrasi moneter, karena dalam menyelesaikan segala macam

aktivitas di sekolah tidak lepas dari penanganan dana cadangan. Dana yang diperoleh atau diberikan oleh pemerintah atau pihak lain memerlukan pengelolaan yang baik (Rangongo et al., 2016). Betapapun besarnya aset sebuah sekolah, jika tidak dikelola dengan baik maka sekolah tersebut akan mengalami musibah.

Sesuai dengan hal tersebut di atas, pengerjaan pelatihan harus ditopang oleh aset yang memadai, SDM dan materi yang berkualitas serta strategi pembelajaran yang tepat (Sujati, 2019). Sumber dana bagi organisasi pendidikan berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Daerah (Peraturan Pemerintah Nomer 48 tahun 2008). Pengelolaan dan tanggung jawab aset moneter sekolah mengacu pada administrasi moneter negara. Peraturan Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 3 ayat (1) tentang pengaturan penyelenggaraan moneter negara menyatakan bahwa pada hakekatnya penatausahaan dana negara oleh badan publik (pusat dan/provinsi) harus diawasi secara sengaja dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. terhadap pedoman hukum, secara produktif, finansial, layak, lugas dan mampu dengan berfokus pada perasaan adil dan terhormat. Dana Pendidikan juga didapat dari sumbangan para alumni, uang spp sekolah untuk sekolah swasta seperti pesantren dan juga wirausaha milik pesantren yang dimana keuntungannya akan dialokasikan untuk dana tambahan di pesantren tersebut.

Hal itulah yang ditunjukkan oleh eksplorasi adillah; Untuk mendapatkan aset guna mengatasi berbagai permasalahan, sekolah harus imajinatif dan kreatif dalam memanfaatkan pintu terbuka yang ada, baik bagi wali siswa, kelompok penasihat sekolah, dan otoritas publik (Adillah, 2016). Dalam penyelenggaraannya, menurut Zahrudin, sekolah perlu mengikutsertakan mitra, baik dari dalam maupun luar, untuk mengatur kerangka moneter saat ini. Melalui kontribusi ini, diharapkan daerah setempat dapat berperan aktif dalam menangani keuangan sekolah, mulai dari dukungan, pemenuhan kebutuhan sekolah, hingga pengawasannya. (Zahrudin et al., 2019).

Pondok Pesantren Ar-Raudhatul Hasanah adalah salah satu pesantren yang memiliki sistem pendidikan yang modern. Pondok pesantren ini memiliki system manajemen keuangan yang baik. Hal ini dibuktikan dengan sarana prasarana lembaga yang baik serta sumber daya manusia yang sejahtera pada lembaga tersebut. Pengaplikasian manajemen dalam sebuah pesantren tentu harus memiliki tujuan yang jelas dan berkualitas. Tujuan dari manajemen keuangan dalam sebuah lembaga pesantren adalah untuk melengkapi kebutuhan pendanaan yang berhubungan erat dengan kegiatan pesantren dengan cara direncanakan lebih dulu, diupayakan pengadaannya, dibukukan dengan transparan dan juga digunakan untuk pembiayaan program sekolah dengan efektif dan efisien.

METODE/EKSPERIMEN

Metode penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif lapangan. Strategi eksplorasi subyektif adalah metode penelitian yang sistematis yang digunakan untuk meninjau atau memusatkan perhatian pada subjek langsung di lingkungan, tanpa manipulasi menggunakan teknik biasa dan tanpa menguji spekulasi. Dengan menggunakan strategi ini, ilmuwan akan berhasil menggambarkan materi pembahasan dari berbagai sumber dan mengkajinya secara mendalam untuk mengambil kesimpulan dari penelitian administrasi keuangan sekolah terhadap kemajuan dan landasan di sekolah pengalaman hidup Islam Ar-Raudlatul Hasanah. Narasumber dalam peninjauan ini terdiri dari direktur sekolah dan pemodal Tingkat Aliyah. Strategi pengumpulan informasi dilakukan dengan memanfaatkan pertemuan, observasi dan dokumentasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

PERENCANAAN ANGGARAN (*BUDGETING*) DI MADRASAH ALIYAH PESANTREN AR-RAUDLATUL HASANAH

Penyusunan atau Perencanaan adalah tindakan atau siklus penyusunan rencana keuangan. Rencana pembelanjaan merupakan suatu pengaturan fungsional yang dikomunikasikan secara kuantitatif sebagai satuan uang tunai yang digunakan sebagai aturan dalam melaksanakan kegiatan

kelembagaan dalam jangka waktu tertentu.. Perencanaan anggaran di Pesantren Ar-Raudlatul Hasanah tingkat Aliyah berpacu pada anggaran pesantren, namun untuk metode para staff Aliyah menggunakan sistem input data di aplikasi sesuai dengan standart yang ada di KEMENAG seperti standart sarana dan prasarana dan lain-lain. Contohnya dalam kasus pengecatan pondok pesantren maka tiap cat dan harganya akan dikelola di aplikasi tersebut dengan terperinci. Semua sudah menggunakan digitalisasi untuk memudahkan dalam pengerjaannya.

PELAKSANAAN KEUANGAN (*ACCOUNTING*) DI MADRASAH ALIYAH PESANTREN AR-RAUDLATUL HASANAH

Pelaksanaan keuangan Pesantren Ar-Raudlatul Hasanah tingkat Aliyah pada dana BOS, maka yang mengelola bukan hanya bendahara Aliyah saja. Akan tetapi dari perencanaan sampai laporan melibatkan tim inti madrasah. Di pesantren ini, tim inti madrasah tersebut ialah kepala madrasah, bendahara dan juga kepala tata usaha Aliyah. Mereka bertigalah yang Menyusun dan juga melaporkan keuangan yang beroperasi di tingkat Aliyah ini. Karena sistemnya keuangan tersebut akan diajukan terlebih dahulu oleh bendahara di aplikasi, kemudian disetujui oleh kepala madrasah di akunnya kepala madrasah dan dipantau oleh kepala tata usaha di akunnya kepala tata usaha. Jadi, semua sistem yang berjalan bersifat transparan. Pelaksanaan ini akan dilaporkan persatu semester atau perenam bulan. Maka para staff Aliyah harus menuntaskannya dalam waktu enam bulan dan sesuai dengan apa yang sudah direncanakan dari Januari-Juli atau Juli-Desember.

EVALUASI (*AUDITING*) KEUANGAN DI MADRASAH ALIYAH PESANTREN AR- RAUDLATUL HASANAH

Evaluasi keuangan di tingkat Aliyah adalah dalam pelaksanaan sistemnya. Karena tidak hanya bagian Aliyah saja yang berkecimpung didalamnya melainkan banyak melibatkan seksi-seksi lainnya. Beberapa seksi tersebut sering terlambat dalam penyerahan laporan. Hal tersebut juga akan menunda bendahara dalam pelaporan di aplikasi secara online. Dan bahkan sering lewat dari jadwal deadline yang sudah ditetapkan.

Pembahasan

Pengelolaan keuangan adalah pengelolaan kegiatan pendidikan, yang berkaitan dengan perolehan dana yang diperlukan untuk pendidikan dan upaya untuk menggunakan dana tersebut dengan nyaman dan efektif.

Kata pesantren sendiri berasal dari kata santri dengan awalan danquot;kapokajquot; dan akhiran andquot;anandquot; yang artinya tempat tinggal para santri atau tempat para santri belajar mengaji dll. Santri berasal dari bahasa Tamil yang artinya guru. Sumber lain menyebutkan bahwa kata tersebut berasal dari kata India danquot;Chastiandquot; dari kata dasar Shastra yang berarti kitab suci, kitab agama atau kitab tentang ilmu pengetahuan (Fitri & Ondeng, 2022).

Istilah pesantren sering disebut dalam bahasa sehari-hari dengan menambahkan kata "pondokandquot; masukkan "pondok pesantren". Dalam kaitannya dengan bahasa, tidak ada perbedaan mendasar antara kata danquot;Pondok danquot; dan danquot;Pondok danquot; karena kata danquot;Pondok danquot; berasal dari bahasa Arab danquot;Funduqandquot; yang berarti asrama. Dalam pemahaman masyarakat Indonesia dapat diartikan sebagai tempat pendidikan agama Islam yang dilembagakan sejak dahulu kala, sehingga pada dasarnya pesantren adalah lembaga pendidikan agama Islam.

Pengelolaan keuangan pesantren adalah proses pengaturan aktivitas atau aktivitas keuangan di pesantren dan lembaga pendidikan afiliasinya, yang meliputi perencanaan, analisis, dan pengendalian kegiatan keuangan, biasanya dilakukan oleh presiden. pengurus dan bendahara dan/atau kepala madrasah secara bersama-sama. bendahara madrasah bidang lembaga pendidikan formal di bawah

naungan Pondok Pesantren. Ada tiga tahapan penting dalam pengelolaan keuangan pondok pesantren, yaitu tahap perencanaan (budgeting), tahap pelaksanaan (akuntansi), dan tahap evaluasi atau evaluasi (auditing). Ketiga langkah tersebut harus diterapkan dalam pengelolaan keuangan pesantren agar urusan keuangan pesantren dan lembaga formal dan informal di dalamnya sehat, dinamis dan akuntabel (Hidayat et al., 2018).

pesantren adalah segala kegiatan yang berkaitan dengan upaya memperoleh dana dengan meminimalkan biaya serta upaya penggunaan dan pengalokasian dana tersebut secara efektif dan efisien. Upaya tersebut dapat berupa pengembangan bisnis pesantren, pengambilan keputusan investasi, dan pengelolaan keuangan lainnya sesuai syariat Islam dan fiqih muamalah. Tugas pengelolaan keuangan di pesantren adalah menyelenggarakan kegiatan sedemikian rupa sehingga tujuan tercapai secara efektif dan efisien. Tegasnya, tidak ada rumusan fungsi manajemen yang bersifat tunggal dan universal (Arifin, 2016).

Manajemen keuangan pondok pesantren memiliki tiga fungsi, yaitu: (1) *Investment Decision* (Menetapkan pengalokasian dana), (2) *Financial Decision* (Memutuskan alternatif pembiayaan), dan (3) *Dividend Decision* (Kebijakan dalam pembagian dividen) (Munib et al., 2022). Belajar manajemen keuangan tidak hanya sekedar mengelola uang pesantren saja, uang tidak akan datang dan ada tanpa mencari tahu dan mencari sumbernya yaitu. negara dan masyarakat, jadi gagasan anggaran pendidikan disini jelas adalah pemerintah. memberikan uang untuk membiayai pendidikan, sehingga pengelolaan keuangan dan kegiatan keuangan pendidikan menjamin negara dan #039; kehadirannya berada dalam kewenangan dan tanggung jawabnya sesuai dengan Pasal 31 ayat (4) UUD 1945 yang menyatakan bahwa negara memprioritaskan anggaran pendidikan paling sedikit dua puluh persen (20%) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan pendapatan negara. . anggaran dan belanja daerah (APBD) untuk memenuhi kebutuhan pelaksanaan pendidikan nasional, turunannya dalam Undang-undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dari dulu sampai sekarang menggunakan istilah anggaran pendidikan (*education budget*) (Inkiriwang, 2020).

Perencanaan atau penganggaran adalah kegiatan atau proses penganggaran. Anggaran merupakan suatu rencana tindakan yang dinyatakan secara kuantitatif dalam satuan moneter, yang digunakan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan lembaga dalam jangka waktu tertentu. Terkait penganggaran, setidaknya ada dua formulir yang harus diisi, yang pertama adalah RKA (Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah) yang biasa disebut RKAS (Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah atau RKAPP (Rencana Aksi Anggaran Internal Sekolah Islam)) dan RAPB (Pendapatan). dan Rencana Aksi). Sering juga disebut dengan RAPBS (Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah), RAPBM (Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Madrasah), atau RAPBPP (Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah Pendapatan Islam).

Pondok pesantren bersama dengan pondok pesantren, komite sekolah atau dewan harus bersama-sama menyusun rencana anggaran belanja pesantren (RAPBPP) bagi pengelola pesantren pada setiap awal tahun anggaran. pesantren dalam menerapkan pengelolaan keuangan yang baik (Gurendrawati et al., 2020).

Anggaran sendiri merupakan suatu rencana yang dibuat dalam bentuk rupee untuk jangka waktu atau periode tertentu dan pengalokasian sumber daya pada setiap bagian dalam suatu operasional. Anggaran memegang peranan penting dalam perencanaan, pemantauan dan evaluasi kegiatan pesantren. Oleh karena itu, setiap penanggung jawab program kegiatan pondok pesantren harus melaksanakan kegiatannya berdasarkan anggaran yang telah ditentukan.

Ada dua bagian utama anggaran yang harus diperhatikan dalam penyusunan RAPBPP, yaitu: a) Pendapatan sumber atau tujuan yang direncanakan untuk tahun yang bersangkutan, termasuk sumber keuangan: 1) biaya wali mahasiswa, 2) swasta. atau iuran organisasi, 3) sumbangan alumni, 4) pesantren hasil perusahaan. B) Rencana pemanfaatan keuangan untuk tahun ini. Penggunaan seluruh dana pesantren dalam satu tahun anggaran harus direncanakan dengan baik agar kehidupan pesantren juga dapat berjalan dengan lancar. Pendanaan Pondok Pesantren digunakan untuk

menutupi seluruh biaya yang berkaitan dengan kebutuhan administrasi Pondok Pesantren, termasuk sumber daya operasional yang berkelanjutan, pengembangan sarana dan prasarana Pondok Pesantren, biaya/gaji/infaq seluruh pengurus/pengurus. sekolah Islam. Pesantren (Salamah, 2014).

Akuntansi adalah bahasa yang digunakan untuk menggambarkan hasil kegiatan ekonomi. Menurut Mulyasa, pelaksanaan keuangan biasanya dapat dikelompokkan menjadi dua fungsi, yakni fungsi pemasukan dan pengeluaran. Pendapatan keuangan pesantren dan pengeluaran yang diterima dari sumber keuangan hendaknya tercermin berdasarkan tata cara administrasi sesuai kesepakatan yang telah disepakati dan dalam konsep teoritis serta dalam bentuk peraturan pemerintah (Arifin, 2016). Misalnya menerima uang dari pelajar dan#039; biaya pendidikan bulanan dimasukkan dalam buku penerimaan biaya pendidikan bulanan dan bukti penerimaannya berupa mahasiswa dan #039; buku biaya bulanan siswa. Keduanya memiliki buku pengelolaan setoran dan penerimaan SPP bulanan.

Auditing adalah proses yang dilakukan oleh orang yang berkualifikasi dan independen untuk mengumpulkan dan mengevaluasi bukti informasi terukur tentang suatu entitas keuangan untuk melaporkan bahwa informasi tersebut memenuhi kriteria yang telah ditentukan (Kusumawardani & Riduwan, 2017). Di sisi lain, menurut Mulyasa, kepemimpinan dalam evaluasi keuangan sekolah merupakan salah satu proses yang harus diterapkan dalam pengelolaan keuangan khusus sekolah (Usman, 2016). Dalam keuangan penyelenggaraan pondok pesantren, ketua administrasi pondok pesantren wajib mengendalikan pondok pesantren beserta pengeluaran keuangannya sesuai dengan RAPB yang telah ditetapkan.

Menurut Nanang Fattah, proses pengendalian secara sederhana terdiri dari tiga fungsi, yaitu pemantauan, evaluasi, dan pelaporan. Proses evaluasi ini dilakukan untuk memastikan kegiatan pengelolaan keuangan berjalan efektif dan efisien serta tidak terjadi penyimpangan dalam prosesnya (Nurmalasari et al., 2019). Di sini hasilnya harus dipantau dan dievaluasi oleh ketua pengurus pondok pesantren. Ada beberapa jenis audit yang berbeda: a) Audit atas laporan keuangan, Tujuan audit atas laporan keuangan adalah untuk mengetahui apakah laporan keuangan secara keseluruhan, yang merupakan informasi terukur dan dapat diverifikasi, disajikan menurut kriteria tertentu, b) Audit operasional, laporan operasional Audit adalah setiap bagian dari suatu organisasi dan praktik operasi serta metodenya yang ditinjau untuk menilai efektivitas dan efisiensi. Biasanya setelah selesai melakukan audit operasional, auditor memberikan beberapa saran kepada manajemen untuk meningkatkan fungsi dan operasional pondok pesantren. c) Audit kepatuhan, audit kepatuhan mencoba mengetahui apakah pihak yang diaudit (klien) mengikuti prosedur atau aturan tertentu, mana pihak yang lebih kuat dan berkuasa. panjang Audit kepatuhan terhadap lembaga swasta (perusahaan) dapat mencakup penentuan apakah. telah ditetapkan oleh lembaga. Contoh peninjauan tingkat upah pemeriksaan perjanjian dengan pihak lain (seperti bank/kreditor), dan memenuhi ketentuan hukum yang berlaku.

PENUTUP

Managemen keuangan adalah kegiatan pengelolaan/pengelolaan keuangan yang meliputi akuntansi, perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan pelaporan. Dengan demikian, pengelolaan keuangan sekolah dapat diartikan sebagai rangkaian kegiatan pengelolaan keuangan sekolah yang dimulai dari perencanaan, pembukuan, pembelanjaan, pemantauan dan pelaporan keuangan sekolah.

Managemen keuangan pesantren merupakan salah satu unsur pengelolaan lembaga pendidikan yang juga menentukan kelancaran operasional pesantren. Sebagaimana halnya isi organisasi pendidikan pada umumnya, pengelolaan keuangan pesantren hendaknya dilakukan melalui proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, koordinasi, pengawasan atau pengendalian. Beberapa fungsi manajemen keuangan meliputi kegiatan untuk memperoleh dan mengidentifikasi sumber pembiayaan, penggunaan dana, pelaporan, audit, dan akuntabilitas.

Dengan bantuan manajemen keuangan, dimungkinkan untuk merencanakan, memperoleh, dan

mencerminkan kebutuhan keuangan Islam secara transparan. kegiatan pesantren dan membiayai pelaksanaan program pesantren secara efektif dan efisien. Oleh karena itu, tujuan pengelolaan keuangan pesantren adalah sebagai berikut: (1) Meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber keuangan pesantren; (2) peningkatan tanggung jawab keuangan dan transparansi pesantren; dan (3) meminimalisir penyalahgunaan anggaran pondok pesantren.

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Ar- Raudlatul Hasanah Medan yang sudah mensupport penelitian ini hingga publish. Terimakasih yang sangat besar juga saya ucapkan kepada tim penelitian ini, Arida Salsabillah dan Muhammad Rizky, mereka adalah Mahasiswa Manajemen Pendidikan Islam di Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Ar-Raudlatul Hasanah. Terimakasih juga kepada Al I'tibar yang telah menerbitkan artikel ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Adillah, G. (2016). Manajemen keuangan sekolah. *Manajer Pendidikan: Jurnal Ilmiah Manajemen Pendidikan Program Pascasarjana*, 10(4).
- Arifin, M. (2016). Manajemen keuangan pondok pesantren. *FIKROTUNA: Jurnal Pendidikan dan Manajemen Islam*, 4(2).
- Chairunnisa, C. (2016). Manajemen pendidikan dalam multi perspektif. *Jakarta: PT Raja Grafindo Persada*.
- Fitri, R., & Ondeng, S. (2022). Pesantren Di Indonesia: Lembaga Pembentukan Karakter. *Al-Urwatul Wutsqa: Kajian Pendidikan Islam*, 2(1), 42–54.
- Fitri R, Suhartono & Marlina. Budaya Pesantren dan Pendidikan Karakter Santri Pada Pondok Pesantren Darussalamah. *Al I'tibar: Jurnal Pendidikan Islam (Vol. 10 No 1)*
- Gurendrawati, E., Murdayanti, Y., & Indriani, S. (2020). Pengembangan Potensi SDM Pesantren Melalui Pelatihan Pemahaman dan Pengetahuan Pengelolaan Keuangan. *Aksiologi: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(1), 20–36.
- Hidayat, T., Rizal, A. S., & Fahrudin, F. (2018). Peran Pondok Pesantren Sebagai Lembaga Pendidikan Islam di Indonesia. *Ta dib Jurnal Pendidikan Islam*, 7(2), 461–472.
- Inkiwang, R. R. (2020). Kewajiban negara dalam penyediaan fasilitas pendidikan kepada masyarakat menurut undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional. *Lex Privatum*, 8(2).
- Kusumawardani, D., & Riduwan, A. (2017). Pengaruh Independensi, Audit Fee, dan Objektivitas terhadap Kualitas Audit. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 6(1).
- Munib, M., Farida, S., Rohim, R., Badruttamam, B., & Faddol, M. (2022). Manajemen Keuangan Dalam Kebijakan Pendidikan Gratis. *IQTISODINA*, 5(2), 18–28.
- Myende, P. E., Samuel, M. A., & Pillay, A. (2018). Novice rural principals' successful leadership practices in financial management: Multiple accountabilities. *South African Journal of Education*, 38(2), 1–11.
- Nurmalasari, I., Jamil, Z. L., & Hidayat, A. (2019). Pengelolaan Pembiayaan Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah Swasta di Bandung. *Dirasat: Jurnal Manajemen dan Pendidikan Islam*, 5(1), 1–19.
- Rangongo, P., Mohlakwana, M., & Beckmann, J. (2016). Causes of financial mismanagement in South African public schools: The views of role players. *South African Journal of Education*, 36(3).
- Said, A. (2019). Kepemimpinan kepala sekolah dalam melestarikan budaya mutu sekolah. *EVALUASI: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 3(1), 257–273.
- Salamah, U. (2014). *Studi Mengenai Sistem Pengelolaan Keuangan Sekolah di Pondok Pesantren Terhadap Penguatan Manajemen Keuangan*.
- Sujati, B. (2019). Kurikulum Dan Pembelajaran Pada Sejarah Dan Kebudayaan Islam Di MTs Kifayatul Akhyar Kota Bandung. *SINAU: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Humaniora*, 5(2), 1–29.
- Suwadji, B. (2014). MANAJEMEN PENINGKATAN MUTU BERBASIS PONDOK PESANTREN. *EDUKASI: Jurnal Pendidikan Islam (e-Journal)*, 2(1), 431–445.
- Usman, J. (2016). Urgensi Manajemen Pembiayaan Dalam Peningkatan Mutu Pendidikan Madrasah. *TADRIS: Jurnal Pendidikan Islam*, 11(2), 219–246.
- Zahrudin, Z., Arifin, Z., & Suhandi, A. (2019). Implementasi Penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan Dan Belanja Sekolah. *Jurnal Administrasi Pendidikan*, 26(1), 46–56.